



PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kolonel Wahid Udin No. 258 Lingk. I Telp. (0714) 321142-321104
SEKAYU 30711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : B-000.7/13/KPTS-BAPPEDA/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun perlu adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah yang harus dilaksanakan dalam tahun 2025;
 - b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
 - 5. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 268);
 - 6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

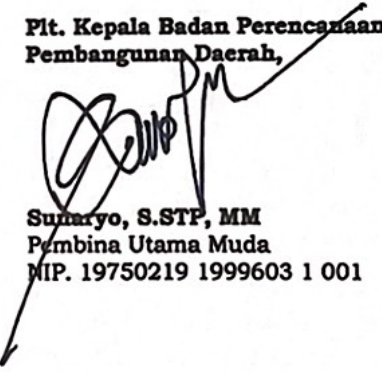
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- Melakukan pemetaan pembagian tugas pada anggota tim penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
 - Mengumpulkan, mengolah data, dan menganalisa data yang berkaitan Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
 - Menyusun, mereview dan mencetak dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
 - Melakukan Koordinasi dan Konsultasi internal dan eksternal ke Instansi terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,



Sunaryo, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750219 1999603 1 001

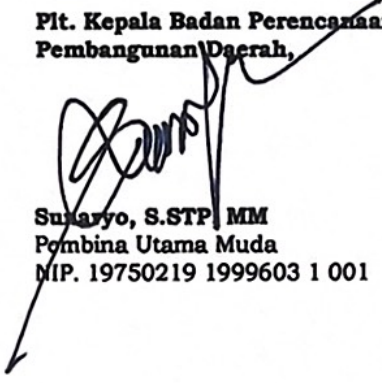
Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : B-000.7/17/KPTS-BAPPEDA/2024
 Tanggal : 9 Januari 2024
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

NO	JABATAN	KET
1	2	3
A. KETUA		
	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	
B. SEKRETARIS		
	Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
C. KOORDINATOR		
	1) Kepala Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3) Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan 4) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 5) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	
D. ANGGOTA		
	1) Kasubbag. Umum dan Kepegawaian 2) Perencana Ahli Madya 3) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan Program Pembangunan 4) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengendalian Pembangunan 5) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan Program Pembangunan 6) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pendidikan dan Budaya 7) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pemerintahan dan Politik 8) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Ekonomi 9) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Sumber Daya Alam 10) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Infrastruktur 11) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengembangan Wilayah 12) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Permukiman dan Lingkungan Hidup 13) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Inovasi dan Teknologi 14) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengkajian Sosial dan Pemerintahan 15) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan 16) Verifikator Keuangan 17) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja 18) Analis Rencana Program dan Kegiatan 19) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	

20) Pengolah Data dan Informasi	
21) Fadli Agasi, S.Kom	
22) Devi Chyntia, S.E	

Ditetapkan di : Sekayu
 Pada tanggal : 9 Januari 2024

**Plt. Kepala Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah,**


Sunaryo, S.STP, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750219 1999603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 258 Telp. (0714) 321142-321104

SEKAYU 30711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : B-000.7/ 374 /KPTS-BAPPEDA/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun perlu adanya Rencana Kerja Tahunan yang harus dilaksanakan dalam tahun 2025;
 - b. bahwa telah dilakukan efisiensi anggaran Bappeda Tahun 2025 dan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sampai Triwulan II;
 - c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberlakukan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada semua pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 26 Juni 2025

**Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,**



Agus Arisman, ST

Pembina / IV.a

NIP. 19740810 199903 1 006

KATA PENGANTAR

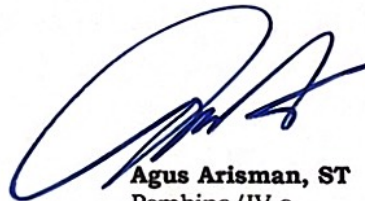
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025. Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 didasarkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, penyelarasan pencapaian target kinerja, dan adanya pergeseran/perubahan pagu kegiatan.

Dokumen ini dibuat untuk menggambarkan proses perencanaan yang telah dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dalam rangka mendukung keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan dan keberlanjutan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 26 Juni 2025

**PLt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,**



Agus Arisman, ST
Pembina/IV.a
NIP. 19740810 199903 1 006

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	3
1.3.	Maksud dan Tujuan	4
1.4.	Sistematika Penulisan	4
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Bulan Mei 2025	6
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD	13
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1.	Rencana Program dan Kegiatan	22
3.2.	Pendanaan Indikatif	33
BAB IV.	PENUTUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah s.d Bulan Mei Tahun 2025 yang masih di bawah 40,75%.....	7
2. Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	12
3. Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2024 Kabupaten Musi Banyuasin.....	14
4. Tabel 3.1.1	Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin	23
5. Tabel 3.1.2	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.....	25
6. Tabel 4.1	Perubahan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2024.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis tahun 2023-2026 yang memuat Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan.

Penyusunan Perubahan Renja mengacu pada Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai Tindak Lanjut terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dalam Pasal 351 ayat (2) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan renja Perangkat Daerah, meliputi :

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat. Setiap indikator dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin memandang perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan Renja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, yaitu :

1. Adanya beberapa peraturan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
 - b. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

- c. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
 - d. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B.000.7.2.4/069/BSPPEDA/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai Tindak Lanjut terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
 - e. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : B.000.7.3/497/BAPPEDA/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Pagu Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2025.
2. Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Bulan Mei Tahun 2025;
 3. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2025; dan
 4. Pergeseran pagu kegiatan serta penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 juga menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perencanaan dan penelitian pengembangan guna mengukur capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan perubahan Renja.
 - a. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Bulan Mei Tahun 2025.
2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja

Perumusan rancangan perubahan Renja mencakup :

 - a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Bulan Mei Tahun 2025; dan
 - c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Penetapan Perubahan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. BAPPEDA mempunyai Rencana Kerja yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Bappeda sehingga tugas pokok dan fungsi Bappeda dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adanya Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan kebutuhan pendanaan perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel;
2. Memberikan arahan dan kendali pada upaya pencapaian program/kegiatan sehingga perencanaan yang mengacu pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang;
3. Sebagai upaya dalam melaksanakan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar dinas dan instansi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 361 ayat (3) adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 3.2. Pendanaan Indikatif

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Bulan Mei 2025

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan Bulan Mei Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Meskipun ada beberapa program kegiatan yang realisasinya masih dibawah rata-rata. Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 4 Program, 19 Kegiatan dan 47 Subkegiatan dengan capaian sebagai berikut :

Pagu Anggaran	: Rp23.261.719.593,-
Realisasi	: Rp 6.756.556.778,-
Persentase Fisik	: 40,75%
Persentase Keuangan	: 32,06%

Adapun secara rincian realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Mei yang masih di bawah target yang telah ditetapkan disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Capaian Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 yang masih dibawah 40,75%.

Uraian Program/Kegiatan		Fisik (%)	Keuangan (%)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA , terdiri dari kegiatan :	40,97	33,90
	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	29,93	11,94
	2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	6,92
	2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36,15	25,87
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH , terdiri dari kegiatan :	29,91	14,22
	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	31,67	12,53
	2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20,12	15,83
	3. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	0
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , terdiri dari kegiatan :	53,79	41,53
	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	38,6	9,83

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , terdiri dari kegiatan :	25,01	7,85
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	25	3,18
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	30	21,34
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	25	3,4
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	22,18	6,85

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib bidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasi penyusunan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan, Aset, Umum dan Perlengkapan;
2. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pengoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD;
4. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan yang untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun

kebijakan teknis dan program di bidang perencanaan pembangunan daerah, meliputi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

5. Pengoordinasian yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berkembang dengan peningkatan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
6. Penyelesaian yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyusunan program – program jangka pendek, menengah dan panjang serta mengoordinasikan program – program lain atas usul perangkat daerah lainnya;
8. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama dengan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
9. Pengoordinasian pendanaan pembangunan;
10. Pengoordinasian perencanaan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam provinsi, antar provinsi dalam negeri dan luar negeri;
11. Pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
12. Penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam lingkup kabupaten;
13. Pengoordinasian, fasilitasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kelitbangan;
14. Pengoordinasian dan sinergitas kerjasama pembangunan daerah dan program Perusahaan;
15. Pengoordinasian pemberian penguatan sistem inovasi daerah;
16. Pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
17. Pengoordinasian pelaksanaan sinkorinisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
18. Pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
19. Pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
20. Penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan;
21. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan

hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;

22. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
23. Penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
24. Pengoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
25. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
26. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bappeda tidak memiliki aturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan. Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kabupaten secara internal maupun dokumen sebagai pelaporan kepada Pemerintah atasan.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin pada tabel 2.1 yang pencapaiannya masih di bawah 40,75%, hal ini pada umumnya dikarenakan adanya efisiensi belanja daerah yang menyebabkan adanya penundaan dan/atau pembatalan pelaksanaan kegiatan. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 063 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025. Adapun efisiensi yang dimaksud dalam surat tersebut antara lain :

1. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD); dan
8. Membatasi belanja yang bersifat pendukung.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Indikator	Target SPM/ standar nasional	Target IKK	Target Capaian Setiap Tahun			Capaian		Mei 2025	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1	Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	29,91%	BAPPEDA KAB. MUBA
2	Persentase keselarasan program Kabupaten dengan program Nasional	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	
3	Persentase program perangkat daerah yang sesuai dengan dokumen perencanaan	-	-	90%	90%	90%	111%	111%	53,79%	
4	Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		100%	100%	100%	100%	100%	40,97%	
5	Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	-	-	90%	90%	90%	100%	111%	25,01%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Tuntutan kinerja aparatur yang optimal guna melaksanakan tupoksi masing-masing bidang;
2. Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Keterbatasan anggaran dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan;
4. Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

Adapun dari permasalahan-permasalahan yang sering muncul tersebut dijadikan bahan masukan dan perbaikan kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD

Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 secara umum sudah selaras dengan P-RKPD tahun 2025. Usul perubahan Renja Perangkat Daerah telah memperhatikan :

- a) Indikator sasaran Prioritas Daerah tahun 2025 yang belum mencapai target sesuai RPJMD dan/atau Renstra-PD;
- b) Kekurangan alokasi anggaran gaji/tunjangan PNS dan TKS;
- c) Kekurangan alokasi biaya Listrik, Air dan Telepon;
- d) Rencana pergeseran pagu antar kegiatan/pekerjaan;
- e) Rencana revisi pekerjaan (nama, lokasi, keluaran);
- f) Rencana efisiensi anggaran dengan menunda belanja dan/atau kegiatan yang belum prioritas;
- g) Potensi tidak dapat diselesaikannya kegiatan/pekerjaan sampai dengan akhir tahun 2025.

Lebih lanjut mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin**

Nama SKPD: BAPPEDA Kab. MUBA

Kode	Program dan Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Perubahan			Catatan Penting		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6,00	7	4	5	10,00	11	12	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran			16.597.551.538,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.092.012.022,60		Bappeda Kab. Muba	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik							-		Bappeda Kab. Muba	
		Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu							-		Bappeda Kab. Muba	
		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan sangat tepat							-		Bappeda Kab. Muba	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70.005.132,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49.885.566,00		Bappeda Kab. Muba	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda Kab. Muba	3 Dokumen	52.540.872,00	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda Kab. Muba	3 Dokumen	41.153.436,00	-	Bappeda Kab. Muba	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda Kab. Muba	3 Laporan	17.464.260,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda Kab. Muba	3 Laporan	8.732.130,00		Bappeda Kab. Muba	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	13.009.695.983,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	14.065.704.000,00		Bappeda Kab. Muba	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Bappeda Kab. Muba	84 Orang/Bulan	13.009.695.983,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kab. Muba	84 Orang/Bulan	14.065.704.000,00	-	Bappeda Kab. Muba	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	95.264.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	91.622.000,00		Bappeda Kab. Muba	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Bappeda Kab. Muba	2 Dokumen	95.264.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Kab. Muba	2 Dokumen	91.622.000,00		Bappeda Kab. Muba	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas ASN			303.900.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			300.078.000,00		Bappeda Kab. Muba	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Bappeda Kab. Muba	1 Paket	76.694.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda Kab. Muba	1 Paket	-	-	Bappeda Kab. Muba	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bappeda Kab. Muba	31 Orang	227.206.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappeda Kab. Muba	31 Orang	300.078.000,00		Bappeda Kab. Muba	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.104.721.261,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	671.028.588,60	-	Bappeda Kab. Muba	

Kode	Program dan Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Perubahan			Catatan Penting		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6,00	7	4	5	10,00	11	12	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda Kab. Muba	1 Paket	29.962.409,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda Kab. Muba	1 Paket	29.962.409,00		Bappeda Kab. Muba
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Muba	2 Paket	172.999.820,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kab. Muba	2 Paket	127.014.407,00	-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bappeda Kab. Muba	1 Paket	59.992.295,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda Kab. Muba	1 Paket	59.992.295,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Muba	1 Paket	249.999.584,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda Kab. Muba	1 Paket	125.678.456,60	-	Bappeda Kab. Muba
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bappeda Kab. Muba	2 Paket	209.998.153,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappeda Kab. Muba	2 Paket	105.679.021,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bappeda Kab. Muba	1 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Bappeda Kab. Muba	1 Paket	40.000.000,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	11.306.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	11.306.000,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda Kab. Muba	2 Laporan	330.463.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda Kab. Muba	2 Laporan	171.396.000,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			84.894.680,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			52.665.608,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bappeda Kab. Muba	4 Unit	84.894.680,00	Pengadaan Mebel	Bappeda Kab. Muba	4 Unit	52.665.608,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda Kab. Muba	100%	1.210.230.482,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda Kab. Muba	100%	1.142.188.260,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappeda Kab. Muba	3 Laporan	435.508.260,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Kab. Muba	3 Laporan	435.508.260,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	774.722.222,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	706.680.000,00		Bappeda Kab. Muba
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Gedung Kantor dan Peralatan Gedung Kantor			718.840.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			718.840.000,00		Bappeda Kab. Muba
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bappeda Kab. Muba	11 Unit	444.930.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda Kab. Muba	11 Unit	444.930.000,00		Bappeda Kab. Muba
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappeda Kab. Muba	1 Unit	199.060.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Kab. Muba	1 Unit	199.060.000,00		Bappeda Kab. Muba

Kode	Program dan Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Perubahan			Catatan Penting		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6,00	7	4	5	10,00	11	12	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappeda Kab. Muba	1 Unit	74.850.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda Kab. Muba	1 Unit	74.850.000,00	-	Bappeda Kab. Muba
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Rasio ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan		90%	3.190.149.781,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN		90%	1.737.413.167,20		Bappeda Kab. Muba
			Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD		70%				70%		-	Bappeda Kab. Muba
			Presentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional		100%				100%			Bappeda Kab. Muba
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan		100%	2.417.344.892,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		100%	1.309.316.492,00		Bappeda Kab. Muba
		Analisis Kondisi daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)	Bappeda Kab. Muba	1 Dokumen	-	Analisis Kondisi daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Muba	1 Dokumen	50.505.000,00		Bappeda Kab. Muba
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Muba	4 Dokumen	553.133.400,00	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda Kab. Muba	4 Dokumen	227.871.000,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	Bappeda Kab. Muba	48 Berita Acara	40.486.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda Kab. Muba	48 Berita Acara	-	-	Bappeda Kab. Muba
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	Bappeda Kab. Muba	48 Berita Acara	846.799.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda Kab. Muba	48 Berita Acara	358.209.000,00		Bappeda Kab. Muba
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Bappeda Kab. Muba	4 Dokumen	976.926.492,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Bappeda Kab. Muba	4 Dokumen	672.731.492,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Analisis Data Perencanaan Program/Kegiatan dalam mencapai RPJMD		100%	63.277.000,00	Analisi Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	64.943.050,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Bappeda Kab. Muba	10 Orang	63.277.000,00	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bappeda Kab. Muba	10 Orang	27.661.000,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan daerah yang Diterbitkan (Buku)	Bappeda Kab. Muba	1 Buku	-	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kab. Muba	1 Buku	37.282.050,00		Bappeda Kab. Muba
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	612.042.750,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	300.656.250,00		Bappeda Kab. Muba

Kode	Program dan Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Perubahan			Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6,00	7	4	5	10,00	11	12
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda Kab. Muba	2 Laporan	212.980.894,00	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda Kab. Muba	2 Laporan	75.229.894,00		Bappeda Kab. Muba
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Muba	6 Laporan	399.061.856,00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Muba	6 Laporan	225.426.356,00		Bappeda Kab. Muba
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		100%	97.485.139,00	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		100%	62.497.375,20	-	
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Muba	3 Dokumen	97.485.139,00	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Muba	3 Dokumen	62.497.375,20	-	Bappeda Kab. Muba
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		90%	2.498.428.750,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		90%	2.185.586.820,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1.048.090.750,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			533.470.500,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Bappeda Kab. Muba	1 Dokumen	210.056.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Bappeda Kab. Muba	1 Dokumen	98.978.000,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	149.987.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	69.109.000,00		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Muba	1 Dokumen	279.137.500,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Muba	1 Dokumen	136.935.250,00		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	408.910.250,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	228.448.250,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100%	250.907.000,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100%	230.235.000,00		Bappeda Kab. Muba

Kode	Program dan Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Perubahan			Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6,00	7	4	5	10,00	11	12
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Muba	5 Dokumen	65.598.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Muba	5 Dokumen	60.956.000,00		Bappeda Kab. Muba
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	20.770.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	36.162.000,00		Bappeda Kab. Muba
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Muba	4 Dokumen	111.544.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Muba	4 Dokumen	87.456.000,00		Bappeda Kab. Muba
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	52.995.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	45.661.000,00		Bappeda Kab. Muba
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	1.199.431.000,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	1.421.881.320,00		Bappeda Kab. Muba
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	313.992.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	447.107.820,00		Bappeda Kab. Muba
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	77.985.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	38.588.000,00		Bappeda Kab. Muba
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	144.751.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	118.422.000,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	466.304.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	668.997.500,00		Bappeda Kab. Muba
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	196.399.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	148.766.000,00		Bappeda Kab. Muba

Kode	Program dan Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Perubahan			Catatan Penting		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6,00	7	4	5	10,00	11	12	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Inovasi yang diimplementasikan		90%	975.589.524,00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		90%	759.064.298,85		Bappeda Kab. Muba
			Presentase Rekomendasi Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti		90%				90%	-		Bappeda Kab. Muba
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersusunnya Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappeda Kab. Muba	100%	273.378.346,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappeda Kab. Muba	100%	248.207.228,00		Bappeda Kab. Muba
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	273.378.346,00	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	248.207.228,00		Bappeda Kab. Muba
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersusunnya Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		100%	159.929.981,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		100%	234.627.839,85	-	Bappeda Kab. Muba
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Bappeda Kab. Muba	2 Dokumen	159.929.981,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Bappeda Kab. Muba	2 Dokumen	34.628.150,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Bappeda Kab. Muba	-	-	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		1 Dokumen	199.999.689,85		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersusunnya Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			202.242.387,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			104.801.333,00		
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bappeda Kab. Muba		202.242.387,00	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bappeda Kab. Muba		104.801.333,00		
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersusunnya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100%	340.038.810,00	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100%	171.427.898,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda Kab. Muba	4 Dokumen	149.628.332,00	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda Kab. Muba	4 Dokumen	73.560.120,00	-	Bappeda Kab. Muba
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			100.342.332,00	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			49.316.000,00		
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bappeda Kab. Muba		90.068.146,00	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bappeda Kab. Muba		48.551.778,00	-	Bappeda Kab. Muba
		PROGRAM RISET DAN INOVASI					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		90%	429.185.800,85		Bappeda Kab. Muba
		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan					Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan		100%	429.185.800,85	-	Bappeda Kab. Muba

Kode	Program dan Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Perubahan			Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6,00	7	4	5	10,00	11	12

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Mekanisme perencanaan sesuai Undang – Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan berawal dari usulan masyarakat yang masuk melalui wadah musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan dan dilanjutkan untuk dibahas tingkat kabupaten. Bappeda sebagai pelaksana perencanaan sesuai tugas dan wewenangnya menyusun hasil musrenbang kabupaten, dengan mengakomodir hasil reses dan hasil musrenbang kecamatan dalam RKPD Kabupaten. Sehingga hasil program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD merupakan hasil musyawarah bersama stakeholders yang terlibat seperti unsur legislatif, unsur tokoh masyarakat, dunia usaha dan akademisi selanjutnya RKPD dituangkan ke dalam KUA PPAS dengan melihat kemampuan keuangan daerah kemudian dibahas di DPRD sebagai cikal bakal APBD.
- b. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan di tingkat desa mulai dari setiap Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya tujuan RPD Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah seperti pada tabel 3.1.1 berikut.

Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan antara Kabupaten, Provinsi, dan Pusat	1 Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD	1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				2 Persentase Keselarasan Program Kabupaten dengan Program Nasional	2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah
				3 Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan	3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatkan Penelitian Pengembangan untuk Pembangunan Daerah	1 Peningkatan Penerapan Hasil Inovasi Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Meningkatkan Hasil Penelitian dari Perangkat Daerah/Stakeholder yang dapat Dimanfaatkan oleh Masyarakat	1 Persentase Hasil Inovasi yang Diimplementasikan	4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				2 Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti	

Dalam proses penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 terdapat pergeseran anggaran yang menyebabkan berubahnya Subkegiatan dari semula 4 Program, 19 Kegiatan dan 47 Subkegiatan menjadi 4 Program, 19 Kegiatan dan 47 Subkegiatan.

Adapun Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 pada Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin, secara rinci dituangkan ke dalam Tabel 3.1.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025				
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			23.887.711.631	23.261.719.593	22.003.262.420					28.202.244.423
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			23.887.711.631	23.261.719.593	22.003.262.420					28.202.244.423
	5	01			PERENCANAAN			22.912.122.107	22.286.130.069	21.015.012.010					26.316.361.423
246	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Sangat Tepat	100 %	100 %	17.223.543.576	16.597.551.538	17.092.012.023				19.667.390.623
	5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	87.469.392	70.005.132	49.885.566				41.649.150
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	70.005.132	52.540.872	41.153.436	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	23.966.550
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	17.464.260	17.464.260	8.732.130	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	17.682.600
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	13.525.445.983	13.009.695.983	14.065.704.000			14.340.371.473
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	13.525.445.983	13.009.695.983	14.065.704.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14.340.371.473
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	95.264.000	95.264.000	91.622.000			95.264.000
	5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	95.264.000	95.264.000	91.622.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	95.264.000
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	303.900.000	303.900.000	300.078.000				675.000.000

5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	76.694.000	76.694.000	-	Kab. Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		75.000.000
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	227.206.000	227.206.000	300.078.000	Kab. Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		600.000.000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.104.721.261	1.104.721.261	671.028.589				1.731.076.000
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.962.409	29.962.409	29.962.409	Kab. Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		30.000.000
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	172.999.820	172.999.820	127.014.407	Kab. Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		500.000.000
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	59.992.295	59.992.295	59.992.295	Kab. Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		80.000.000
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	249.999.584	249.999.584	125.678.457	Kab. Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		300.000.000
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	209.998.153	209.998.153	105.679.021	Kab. Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		260.000.000
5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kab. Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		50.000.000
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	11.306.000	11.306.000	11.306.000	Kab. Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		11.076.000
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	330.463.000	330.463.000	171.396.000	Kab. Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		500.000.000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	84.894.680	84.894.680	52.665.608				100.000.000

	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	21 Unit	84.894.680	84.894.680	52.665.608	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100.000.000
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.303.008.260	1.210.230.482	1.142.188.260				2.002.200.000
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	435.508.260	435.508.260	435.508.260	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		700.000.000
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	867.500.000	774.722.222	706.680.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1.302.200.000
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Gedung Kantor dan Peralatan Gedung kantor	100 %	100 %	718.840.000	718.840.000	718.840.000				681.830.000
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	444.930.000	444.930.000	444.930.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		407.770.000
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	199.060.000	199.060.000	199.060.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		199.060.000
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	41 Unit	74.850.000	74.850.000	74.850.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		75.000.000
249	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPd dalam RPJMD	100%	100%	3.190.149.781	3.190.149.781	1.737.413.167				2.992.832.800
							Rasio ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan	70%	70%							
							Presentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	90%	90%							
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya Dokumen dan Pendanaan	100 %	100 %	2.417.344.892	2.417.344.892	1.309.316.492				1.969.262.800
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	50.505.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		-

	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	553.133.400	553.133.400	227.871.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		470.000.000
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	48 Berita Acara	48 Berita Acara	40.486.000	40.486.000	-	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		38.950.000
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	48 Berita Acara	48 Berita Acara	846.799.000	846.799.000	358.209.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		390.312.800
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	10 Dokumen	10 Dokumen	976.926.492	976.926.492	672.731.492	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1.070.000.000
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Rekomendasi Hasil Data Analisis Perencanaan Program/Kegiatan dalam Mencapai Target RPJMD	100 %	100 %	63.277.000	63.277.000	64.943.050				179.570.000
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	10 Orang	10 Orang	63.277.000	63.277.000	27.661.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		179.570.000
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	-	-	37.282.050	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		-
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	612.042.750	612.042.750	300.656.250				694.000.000
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	212.980.894	212.980.894	75.229.894	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		250.000.000
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	6 Laporan	399.061.856	399.061.856	225.426.356	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		444.000.000
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	97.485.139	97.485.139	62.497.375				150.000.000

	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	97.485.139	97.485.139	62.497.375	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		150.000.000
250	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan	90 %	90 %	2.498.428.750	2.498.428.750	2.185.586.820				3.656.138.000
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	1.048.090.750	1.048.090.750	533.470.500				1.161.138.000
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	210.056.000	210.056.000	98.978.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		224.300.000
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	149.987.000	149.987.000	69.109.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		186.838.000
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	279.137.500	279.137.500	136.935.250	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		250.000.000
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	408.910.250	408.910.250	228.448.250	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		500.000.000
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %	100 %	250.907.000	250.907.000	230.235.000				945.000.000
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	65.598.000	65.598.000	60.956.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		300.000.000

	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	20.770.000	20.770.000	36.162.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		120.000.000
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	111.544.000	111.544.000	87.456.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		350.000.000
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan	52.995.000	52.995.000	45.661.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		175.000.000
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	1.199.431.000	1.199.431.000	1.421.881.320				1.550.000.000
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	313.992.000	313.992.000	447.107.820	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		400.000.000
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	77.985.000	77.985.000	38.588.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100.000.000
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	144.751.000	144.751.000	118.422.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		150.000.000
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	466.304.000	466.304.000	668.997.500	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		600.000.000
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	196.399.000	196.399.000	148.766.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		300.000.000
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				975.589.524	975.589.524	988.250.410				1.885.883.000
251	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentasi hasil inovasi yang diimplementasikan	90 %	90 %	975.589.524	975.589.524	559.064.609				1.885.883.000

	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	100 %	273.378.346	273.378.346	248.207.228				470.000.000
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	2 Laporan	273.378.346	273.378.346	248.207.228	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		470.000.000
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	100 %	159.929.981	159.929.981	34.628.150				300.000.000
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	2 Dokumen	159.929.981	159.929.981	34.628.150	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		300.000.000
						Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		1 Dokumen			199.999.690				
	5	05	02	2.04		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersusunnya Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 %	100 %	202.242.387	202.242.387	104.801.333				350.000.000
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	202.242.387	202.242.387	104.801.333	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		350.000.000
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersusunnya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %	100 %	340.038.810	340.038.810	171.427.898				765.883.000
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	5 Dokumen	149.628.332	149.628.332	73.560.120	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		400.000.000
	5	05	02	2.05	0002	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	3 Laporan	100.342.332	100.342.332	49.316.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		215.883.000
	5	05	02	2.06	0003	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	90.068.146	90.068.146	48.551.778	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		150.000.000
251	5	05	02			PROGRAM RISET DAN INOVASI						429.185.801				
	5	05	02	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan						429.185.801				
	5	05	02	2.01	0014	Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Jumlah Naskah Kebijakan Berbasis Hasil Riset					299.999.800	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		

	5	05	02	2.01	0014	Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dalam Bentuk Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah					129.186.001	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		
--	---	----	----	------	------	--	---	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

3.2. Pendanaan Indikatif

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin. Program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat dari 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2 Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025 (Rp)	P-RKPD 2025
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.597.551.538,00	17.092.012.023,60
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.005.132,00	49.885.566,00
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.540.872,00	41.153.436,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.464.260,00	8.732.130,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.009.695.983,00	14.065.704.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.009.695.983,00	14.065.704.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.264.000,00	91.622.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	95.264.000,00	91.622.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	303.900.000,00	300.078.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	76.694.000,00	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	227.206.000,00	300.078.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.104.721.261,00	671.028.589,60
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.962.409,00	29.962.409,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.999.820,00	127.014.407,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.295,00	59.992.295,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.999.584,00	125.678.457,60
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	209.998.153,00	105.679.021,00
	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.306.000,00	11.306.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.463.000,00	171.396.000,00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.894.680,00	52.665.608,00
	Pengadaan Mebel	84.894.680,00	52.665.608,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.210.230.482,00	1.142.188.260,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.508.260,00	435.508.260,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	774.722.222,00	706.680.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.840.000,00	718.840.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.930.000,00	444.930.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.060.000,00	199.060.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.850.000,00	74.850.000,00
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.190.149.781,00	1.737.413.167,20
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.417.344.892,00	1.309.316.492,00
	Analisis Kondisi daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	-	50.505.000,00
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	553.133.400,00	227.871.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	40.486.000,00	-
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	846.799.000,00	358.209.000,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab/Kota	976.926.492,00	672.731.492,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	63.277.000,00	64.943.050,00
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	63.277.000,00	27.61.000,00
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	37.282.050,00

	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	612.042.750,00	300.656.250,00
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	212.980.894,00	75.229.894,00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	399.061.856,00	225.426.356,00
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	97.485.139,00	62.497.375,20
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah di Bidang Pembangunan Daerah	97.485.139,00	62.497.375,20
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.498.428.750,00	2.185.586.820,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.048.090.750,00	533.470.500,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	210.056.000,00	98.978.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	149.987.000,00	69.109.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	279.137.500,00	136.935.250,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	408.910.250,00	228.448.250,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	250.907.000,00	230.235.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65.598.000,00	60.956.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.770.000,00	36.162.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	111.544.000,00	87.456.000,00

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	52.995.000,00	45.661.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.199.431.000,00	1.421.881.320,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	313.992.000,00	447.107.820,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	77.985.000,00	38.588.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	144.751.000,00	118.422.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	466.304.000,00	668.997.500,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	196.399.000,00	148.766.000,00
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	975.589.524,00	759.064.359,60
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	273.378.346,00	248.207.228
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	273.378.346,00	248.207.228
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	159.929.981,00	234.627.839,85
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	159.929.981,00	34.628.150,00
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	199.999.689,85
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	202.242.387,00	104.801.333,00
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	202.242.387,00	104.801.333,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	340.038.810,00	171.427.898,00
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	149.628.332,00	73.560.120,00

	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100.342.332,00	49.316.000,00
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	90.068.146,00	48.551.778,00
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	429.185.800
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan		429.185.800,85
	Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset		299.999.799,85
	Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah		129.186.001,00
	JUMLAH	23.261.719.593,00	22.203.262.109,50

BAB V

PENUTUP

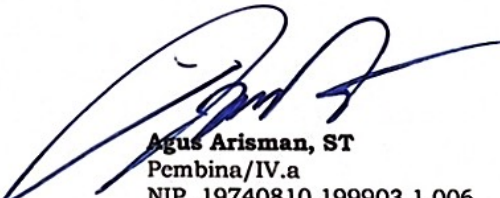
Perubahan Rencana Kerja dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan sebagai alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini antara lain bertujuan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Bappeda yang mendukung tujuan Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Bappeda serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Adanya perubahan antara program, kegiatan dan subkegiatan didasarkan pada tujuan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Perubahan anggaran juga memperhatikan ketersediaan pendanaan yang ada.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2025. Selain itu, sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Dengan ini diharapkan Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan sasaran dan strategi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekayu, 26 Juni 2025

**Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,**



Agus Arisman, ST
Pembina/IV.a
NIP. 19740810 199903 1 006